

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KALTARA CERDAS BAGI MAHASISWATIDAK MAMPU DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

JURNAL ILMIAH

diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



oleh

ANDINI KUSUMADEWI

NPP. 28.1526

Program Studi: Politik Pemerintahan

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JATINANGOR, 2021**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KALTARA
CERDAS BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DI
KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Andini Kusumadewi
NPP. 28.1526

*Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Program Studi Politik Pemerintahan*

Email: andinikd29@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): *The implementation of the Smart Kaltara program in Bulungan Regency has not gone well. Judging from the coordination between students and educational operators who are responsible for handling this policy.*

Purpose: *The aim is to find out and analyze how the implementation of the Kaltara Smart Program Policy for underprivileged students in Bulungan Regency, North Kalimantan Province. Method:* *The research method used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach, namely a method to make a clear and systematic, factual and accurate picture of existing data and facts in the field. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis steps are data reduction, data presentation and conclusion / verification.*

Result : *The results of this study indicate that the implementation of the policy implementation of the Smart Kaltara program with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure has been good. However, there are still inhibiting factors related to resources and coordination between parties, as well as a lack of thoroughness with students, which causes misunderstanding between implementers. Conclusion :* *And communication between the person in charge and the student is still not going well so that the coordination between the student and the operator in charge is not going well. Then adequate resources are still lacking, especially for staff or employees who are dedicated to handling this program so that no employee is burdened because they have two main tasks and functions.*

Keywords: *Implementation, Not capable students, North Kalimantan Smart Program*

ABSTRAK

Permasalahan : Pelaksanaan program kaltara cerdas di Kabupaten Bulungan belum berjalan dengan baik. Dilihat dari koordinasi antar mahasiswa dengan operator pendidikan yang bertanggung jawab dalam menangani kebijakan ini. **Tujuan** :Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Kebijakan Program Kaltara Cerdas bagi siswa kurang mampu di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. **Metode** : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu suatu metode untuk membuat gambaran yang jelas dan sistematis, faktual dan akurat tentang data dan fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil/temuan** : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan implementasi program Kaltara Cerdas dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah baik. Namun, masih terdapat faktor penghambat terkait sumber daya dan koordinasi antar pihak, serta kurangnya ketelitian dengan siswa sehingga menimbulkan kesalahpahaman antar pelaksana. **Kesimpulan** : Dan komunikasi antara penanggung jawab dengan mahasiswa masih belum berjalan dengan baik sehingga koordinasi antara mahasiswa dan operator yang bertugas tidak berjalan dengan baik. Kemudian sumber daya yang memadai masih kurang terutama bagi staf atau pegawai yang berdedikasi menangani program ini sehingga tidak ada pegawai yang terbebani karena memiliki dua tugas pokok dan fungsi.

Kata Kunci : **Implementasi, Mahasiswa Tidak Mampu, Program Kaltara Cerdas**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan Utara merupakan provinsi pemekaran dari Kalimantan Timur Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Kecamatan Tanjung Selor bersama dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bulungan. Secara Geografis letak dan batas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 209°19''-334°49'' Lintang Utara. 116 04'41''-117 57'56'' Bujur Timur. Yang berbatasan sebelah barat Kabupaten Malinau. Sebelah utara Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Sebelah selatan Kabupaten Berau, dan sebelah timur Laut Sulawesi dan Kota Tarakan. Dan Luas Wilayah 13.181,92 km². Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan 150.656 jiwa dan tersebar di 10 kecamatan. Diantaranya Bunyu, Sekatak, Tanjung Palas

tengah, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas, Peso, Peso Hilir. Dalam konteks pendidikan, permasalahan pokok Kabupaten Bulungan adalah bagaimana Pemerintah Daerah memberikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas yang mampu dinikmati oleh seluruh warganya tanpa adanya diskriminasi. Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi, karena daerah mempunyai kemampuan dan kekuasaan serta kebebasan untuk memutuskan suatu kebijakan di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama dikarenakan provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi pemekaran dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan dana pendidikan. Dalam merealisasikan program bantuan dana pendidikan Kaltara Cerdas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan bantuan berupa dana pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Untuk penyaluran sejak 2016 hingga tahun 2020 anggaran disiapkan dana sejumlah Rp. 51,23M. Beasiswa yang diterima hingga tahun lalu berjumlah 13.550 orang. Yang tidak mampu kurang lebih 40% yang berprestasi 40% dan SLTA sederajat 20%.

1.2 Permasalahan

Pelaksanaan program kaltara cerdas di Kabupaten Bulungan belum berjalan dengan baik. Dilihat dari koordinasi antar mahasiswa dengan operstor pendidikan yang bertanggung jawab dalam menangani kebijakan ini. Berdasarkan empat

indikator yang dikemukakan dalam teori implementasi oleh Edward III dalam Budi Winarno yaitu komunikasi antar mahasiswa dan operator, informasi yang disampaikan dari pihak penanggung jawab kepada mahasiswa belum sampai dan dicerna dengan baik oleh mahasiswa dengan jelas. Dan komunikasi antar penanggung jawab dan mahasiswa masih kurang berjalan dengan baik sehingga koordinasi antara mahasiswa dan operator penanggung jawab tidak berjalan dengan baik. Kemudian sumber daya yang memadai masih kurang terutama untuk staf atau pegawai yang di khususkan untuk menangani program ini sehingga tidak ada pegawai yang terbebani karena mempunyai dua tupoksi yang dijalankan. Dan proses implementasi kebijakan program Kaltara Cerdas ini dapat berjalan dengan maksimal dan terfokus. Untuk fasilitas yang memadai terutama fasilitas yang mendorong jalannya implementasi ini adalah fasilitas umum yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi peserta program Kaltara Cerdas. Diutamakan mahasiswa yang memiliki fasilitas atau nomor rekening Bank Kaltimara. Selanjutnya untuk fasilitas umum lain dibolehkan hanya saja untuk mempermudah pendistribusian dana di prioritaskan Bank daerah atau Bank Kaltimara. Namun mahasiswa lalai atau kurang teliti dalam menginput data mengenai nomor rekening. Ada beberapa mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam menginput data rekening atau nomor rekening. Mahasiswa ada yang salah menginput dan ada juga yang memasukkan nomor rekening yang sudah tidak aktif. Sikap implementor yang menjadi penghambat jalannya sebuah kebijakan pada program Kaltara Cerdas ini bisa dilihat dari mahasiswa yang kurang sabar dan kurang intens atau teliti dalam mengecek data yang telah diinput untuk mendapatkan dana bantuan Kaltara Cerdas. Namun dibalik dari kurang ketelitian ada pihak dari penanggung jawab untuk menghubungi mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam menginput nomor rekening. Dan SOP yang dilaksanakan pada kebijakan ini mahasiswa sudah bisa memenuhi standar prosedur namun kesalahpahaman bisa saja terjadi. Karena kurang telitinya mahasiswa dalam menginput. Untuk kesuksesan sebuah kebijakan diperlukan koordinasi diantara organisasi dengan baik. Akan tetapi keseringan dari masing-masing organisasi mempertahankan ego sektoral sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks bantuan dana untuk mahasiswa kurang mampu maupun dalam peningkatan

kompetensi. Penelitian Shavira dan Tjijik yang berjudul *Pengaruh Implementasi Program Beasiswa Generasi Emas Terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*. Menemukan bahwa terdiri dari enam sub variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Kedua variabel Y (Kompetensi) juga terdiri dari enam indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Populasi dari penelitian ini dari Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan sampel 118 responden. (Shavira Ayu Wulandari dan Tjijik Rahaju). Penelitian Maghfira menemukan bahwa implementasi program penyaluran beasiswa SPP gratis sudah cukup baik. Hal ini di buktikan dengan berdasar pada observasi dan wawancara yang dilakukan, pada beberapa faktor yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen/badan pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Mahgfira Fitri Maulani, 2018). Penelitian Ali dan Irfan menemukan bahwa salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya sekaligus menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul di masa depan. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu pelaksana kebijakan bidikmisi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut masih ditemui beberapa masalah seperti salah sasaran, penyaluran uang saku bulanan yang sering terlambat, birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya monitoring serta koordinasi dari stakeholder yang terkait. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada stakeholders yaitu melakukan penyesuaian biaya hidup bulanan yang diberikan kepada mahasiswa. Memberikan pelatihan manajemen keuangan, dan entrepreneurship. Meningkatkan selektifitas dalam penetapan mahasiswa bidikmisi. Menyederhanakan proses birokrasi sehingga tidak menghambat proses pencairan biaya hidup bulanan. Memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa bidikmisi dengan program yang sifatnya memperdayakan. Serta memperbaiki sistem monitoring dan koordinasi mulai dari tingkat jurusan

hingga universitas dengan sebuah sistem yang terintegrasi.(Ali Roziqin, Irfan Murtadho Yusuf 2018).

Penelitian Nurazizah menemukan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Luwu Timur terkait peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Timur. Kebijakan ini pun sangat membantu masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pemberian beasiswa mahasiswa ini dianggap berhasil dalam sudut pandang peningkatan alokasi anggaran tiap tahunnya dan jumlah penerima beasiswa yang selalu meningkat (Nurazizah Syarif 2020). Penelitian dari andry, andreas dan eka , menyatakan bahwa Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati terkait Kabupaten Jembrana Beasiswa Strata-1 Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui perspektif kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Jembrana memiliki kebijakan yang patut dibanggakan untuk dilaksanakan kebijakan pendidikan beasiswa Strata-1. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk mendapatkan potensi akademik yang berkualitas dan juga sebagai wujud akuntabilitas pemerintah kabupaten Jembrana kebijakan pendidikan beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Jembrana.(I Nyoman Andry Christian , Piers Andreas Noak, Putu Eka Purnamaningsih)

1.4 Perrnyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan program kaltara cerdas bagi mahasiswa tidak mampu di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Menggunakan indikator yang berbeda juga dari sebelumnya yakni pendapat dari Edward iii(Budi Winarno 2008) yang menyatakan bahwa ada empat faktor yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Kaltara Cerdas bagi Mahasiswa tidak mampu di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi (2010:20) menjelaskan bahwa metodologi kualitatif menjadi sebuah prosedur penelitian yang menciptakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Ungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang didalamnya. Terdapat macam-macam interview/wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017:232) yaitu : wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak berstruktur. Namun penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam mengumpulkan data kualitatif penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 informan yang terdiri dari, : Bupati Kabupaten Bulungan , Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulungan , Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Kepala Biro Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian di Universitas Kaltara, Orangtua dari mahasiswa 4 orang, Mahasiswa 4 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Program Kaltara Cerdas di Kabupaten Bulungan

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2015 tentang program bantuan dana pendidikan lewat program Kaltara Cerdas. Sasaran penerima bantuan dana pendidikan terdiri dari. Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kalimantan Utara. Mahasiswa asal Kalimantan Utara yang secara mandiri menempuh pendidikan diluar daerah dan diluar negeri. Bantuan Dana pendidikan biasa bagi mahasiswa kurang mampu. Dalam perjalanannya, alokasi anggaran Kaltara cerdas dimulai pada 2015 untuk pelaksanaan pada 2016. Saat itu sebanyak 1.483 mahasiswa di akomodir. Lalu pada 2017, berhasil tersalurkan kepada 2.373 penerima, 2018 meningkat menjadi 4.690 orang. Dan pada 2019 untuk

5.004 orang mahasiswa dan pelajar. Dari 2016 hingga 2019, total anggaran untuk Kaltara Cerdas ini mencapai Rp 41,23 miliar. Untuk nominal yang diterima sebesar Rp 1,5 juta.

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas terdapat pasal 5 yang mengatur tentang sasaran dari penerima program Kaltara Cerdas yang berbunyi “Sasaran penerima bantuan pendidikan terdiri dari, mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kalimantan Utara dan Mahasiswa asal Kalimantan Utara yang secara mandiri menempuh pendidikan di luar daerah dan diluar negeri.

3.2 Faktor penghambat dari implementasi kebijakan dari program kaltara cerdas

A. Sumber daya manusia yang kurang memadai untuk mengurus di bidang khusus pada program kaltara cerdas ini. Membuat pegawai juga kewalahan dalam mengatasi adanya kelemahan dari program ini. Sumber daya manusia yang kurang membuat program ini terhambat.

B. Kurang ketelitian dari pihak mahasiswa dan main hakim sendiri kepada pihak penanggung jawab. Perihal mengenai insetif memang sensitif apalagi mahasiswa yang jalur nya kurang mampu. Mereka yang sangat mengharapakan dana ini mengalami kesalahpahaman terhadap pihak penanggung jawab. Padahal sebenarnya kesalahan ada di mahasiswa itu sendiri yang kurang teliti dan respect terhadap diri sendiri.

C. Koordinasi yang kurang dari mahasiswa ke pihak penanggung jawab, karena mahasiswa kurang dalam berkomunikasi kepada pihak penanggung jawab menyebabkan koordinasi antar implementor kurang berjalan dengan baik. Dan koordinasi yang kurang dijalin dengan baik antar implementor.

3.3 Upaya untuk menyelesaikan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Kaltara Cerdas bagi Mahasiswa tidak mampu di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

A. Penambahan sumber daya manusia, Memadai sumber daya yang menjadi penghambat dari berjalannya program ini. Sumber daya manusia yaitu pegawai yang tidak dikhususkan untuk menangani program ini dan kurang jumlah nya menyebabkan

pegawai yang kewalahan dalam mengurus mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam menginput data.

B. Ketelitian pada mahasiswa, Dan untuk peserta yang mendaftar khususnya mahasiswa di tekankan untuk mempersiapkan lebih teliti dalam memasukan data terutama nomor rekening yang menjadi sarana dalam pendistribusian dana ini. Tidak diwajibkan bank daerah namun demi kelancaran program ini di mahasiswa harus mempunyai rekening Bank Daerah Kaltimara.

C. Menjaln koordinasi yang baik antar implementor. Koordinasi antar implementor lebih ditingkatkan kembali. Mengingat kesalahan yang terdahulu diharapkan kesadaran antar implementor yang menjalankan program ini untuk membangun komunikasi dengan baik. Contoh jika terjadi kekeliruan untuk segera dikonfirmasi kembali kepada pihak yang bertanggung jawab.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Maksud dari Program Kaltara Cerdas adalah program yang dibuat oleh dan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara pada Tahun 2015. Program tersebut bersandar pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu dan memberikan masyarakat yang kurang mampu yang berstatus sebagai mahasiswa agar bisa sekolah diperguruan tinggi tanpa adanya beban dengan permasalahan biaya. Manfaat yang diharapkan dari program ini yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman program bantuan dana pendidikan kaltara cerdas pemerintahan provinsi Kalimantan utara, ialah :

1. Dapat meningkatkan akses dan kesempatan belajar diperguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan yang berpotensi akademi tinggi dan kurang mampu secara ekonomi,
2. Dapat menjalani keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai.
3. Bisa meningkatkan prestasi mahasiswa baik pada bidang akademik/kurikuler, no-kulikuler maupun ekstra kulikuler.
4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa, dan mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi.

Pada uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa begitu jelas uraian teori Edward III dalam menganalisa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Program Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkhusus bagi mahasiswa yang kuran mampu dan ingin melanjutkan sekolahnya di Perguruan Tinggi namun masih kurangnya dorongan dengan faktor biaya.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan program kaltara cerdas di Kabupaten Bulungan belum berjalan dengan baik. Dilihat dari koordinasi antar mahasiswa dengan operator pendidikan yang bertanggung jawab dalam menangani kebijakan ini. Berdasarkan empat indikator yang dikemukakan dalam teori implementasi oleh Edward iii dalam Budi Winarno yaitu komunikasi antar mahasiswa dan operator, informasi yang disampaikan dari pihak penanggung jawab kepada mahasiswa belum sampai dan di cerna dengan baik oleh mahasiswa dengan jelas. Dan komunikasi antar penanggung jawab dan mahasiswa masih kurang berjalan dengan baik sehingga koordinasi antara mahasiswa dan operator penanggung jawab tidak berjalan dengan baik. Diutamakan mahasiswa yang memiliki fasilitas atau nomor rekening Bank Kaltimtara. Selebihnya untuk fasilitas umum lain dibolehkan hanya saja untuk mempermudah pendistribusian dana di prioritaskan Bank daerah atau Bank Kaltimtara. Namun mahasiwa lalai atau kurang teliti dalam menginput data mengenai nomor rekening. Ada beberapa mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam menginput data rekening atau nomor rekening. Mahasiswa ada yang salah dalam menginput dan ada juga yang memasukan nomor rekening yang sudah tidak aktif. Sikap implementor yang menjadi penghambat jalannya sebuah kebijakan pada program kaltara cerdas ini bisa dilihat dari mahasiswa yang kurang sabar dan kurang intens atau teliti dalam mengecek data yang telah diinput untuk mendapatkan dana bantuan kaltara cerdas. Namun dibalik dari kurang ketelitian ada pihak dari penanggung jawab untuk menghubungi mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam menginput nomor rekening. Dan SOP yang dilaksanakan pada kebijakan ini mahasiswa sudah bisa memenuhi standar prosedur namun kesalahpahaman bisa saja terjadi. Karena kurang telitinya mahasiswa dalam menginput. Untuk kesuksesan sebuah kebijakan diperlukan koordinasi diantara organisasi dengan baik. Akan tetapi keseringan dari masing-masing organisasi mempertahankan ego sektoral sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bulungan dan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulungan beserta perangkatnya yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dalam kelancaran pengumpulan data yang telah dibutuhkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ali Roziqin, Irfan Murtadho Yusuf (2018). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro. *Jurnal*

I Nyoman Andry Christian , Piers Andreas Noak, Putu Eka Purnamaningsih Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Jembrana terkait Pemberian Beasiswa Strata-1 dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal*.

Mahgfira Fitri Maulani, 2018 Implementasi Program Penyaluran Beasiswa (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal*

Nurazizah Syarif (2020) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal*

Shavira dan Tjijik berjudul *Pengaruh Implementasi Program Beasiswa Generasi Emas Terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*. *Jurnal*

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*.

Yogyakarta: CAPS